

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan suatu negara adalah menurunnya jumlah penduduk miskin. Saat ini masalah kemiskinan bukan hanya merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi masalah global. Pada September 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan sebuah kebijakan yaitu *Millenium Development Goals (MDGs)* yang harus dicapai oleh 189 negara anggotanya pada tahun 2015, dimana sasaran pertama dari *MDGs* tersebut adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem.

Di negara berkembang seperti Indonesia, peranan sumber daya manusia mengambil tempat yang sentral, khususnya dalam pembangunan ekonomi, dimana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam ekonomi masyarakat. Berpedoman pada hal ini masalah penduduk termasuk di dalamnya kemiskinan dan tenaga kerja, baik secara kualitatif dan kuantitatif, wajib diberi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memandang pembangunan yang menjamin keberlanjutan hidup manusia dan berkeadilan sosial merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak atas pembangunan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, program pembangunan harus diarahkan untuk pemerataan dan pengurangan kemiskinan melalui komitmen visi pembangunan nasional, dan diimplementasikan melalui konsep pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Menurut Simatupang dan Dermoredjo (2003), pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak

dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Bank Dunia (2004) mendefinisikan kemiskinan ini dengan kehidupan seseorang yang pendapatannya kurang dari \$ 1 USD per hari.

Tabel 1.1
Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
2009	32,53	14,15
2010	31,02	13,33
2011	29,89	12,36
2012	28,59	11.66
2013	28,55	11,47

Sumber Data: BPS, 2013 (diolah)

Pada Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2009-2013 terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2009 adalah 32,53 juta orang atau 14,15 persen, tahun 2010 adalah 31,02 juta orang atau 13,33 persen, tahun 2011 adalah 29,89 juta orang atau 12,36 persen, tahun 2012 adalah 28,59 juta orang atau 11.66 persen, angka tersebut sampai dengan tahun 2013 menjadi 28,55 juta orang atau 11,47 persen. Secara data berarti bahwa Indonesia mampu menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi selama ini. Namun keberhasilan negara Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan tidak setinggi negara lain. Ini terlihat dari tingkat

kemiskinan yang masih relatif tinggi. Indonesia memang setiap tahunnya mengalami penurunan dalam tingkat kemiskinan akan tetapi Indonesia masih tergolong dalam 100 negara termiskin di dunia, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
100 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan Penghitungan GDP (US Dollar) Tahun 2013

No	Country	GDP	No	Country	GDP	No	Country	GDP	No	Country	GDP
1	Zimbabwe	\$200	26	Haiti	\$1,400	51	Camerun	\$2,400	76	Maldives	\$4,700
2	Congo	\$300	27	Sao Tome	\$1,400	52	Moldova	\$2,500	77	Bolivia	\$4,700
3	Burundi	\$400	28	Tanzania	\$1,400	53	Timor Leste	\$2,500	78	Vanuatu	\$4,700
4	Liberia	\$500	29	Bangladesh	\$1,500	54	Pakistan	\$2,600	79	Bhutan	\$4,800
5	Guenia-Bissau	\$600	30	Benin	\$1,500	55	Yemen	\$2,600	80	Syiria	\$4,900
6	Somalia	\$600	31	Ghana	\$1,500	56	Uzbekistan	\$2,700	81	Georgia	\$5,000
7	Central African Republic	\$700	32	Zambia	\$1,500	57	India	\$2,900	82	Jordan	\$5,000
8	Eritrea	\$700	33	Chad	\$1,600	58	Marshal Island	\$2,900	83	Nauru	\$5,000
9	Nigeria	\$700	34	Lesotho	\$1,600	59	Vietnam	\$2,900	84	Samoa	\$5,000
10	Sierra Leone	\$700	35	Tuvalu	\$1,600	60	Nicaragua	\$3,000	85	Swaziland	\$5,100
11	Afghanistan	\$800	36	Cote d'Ivoire	\$1,700	61	Mongolia	\$3,300	86	Guatemala	\$5,400
12	Ethiopia	\$800	37	Kenya	\$1,800	62	Philippines	\$3,400	87	Egypt	\$5,500
13	Malawi	\$800	38	Korea	\$1,800	63	Fiji	\$3,700	88	Nabmibia	\$5,500
14	Mozambique	\$900	39	Senegal	\$1,800	64	Honduras	\$3,700	89	Turmenistan	\$5,800
15	Rwanda	\$900	40	Tajikistan	\$1,800	65	Kiribati	\$3,700	90	China	\$6,100
16	Togo	\$900	41	Mauritania	\$1,900	66	Congo	\$3,800	91	Albania	\$6,400
17	Nepal	\$1,000	42	Solomon Island	\$1,900	67	Djibouti	\$3,800	92	El Salvador	\$6,400
18	Comoros	\$1,100	43	Cambodia	\$2,100	68	Indonesia	\$3,900	93	Armenia	\$6,600
19	Guinea	\$1,100	44	Laos	\$2,100	69	Guyana	\$4,000	94	Boznia and Herzegovina	\$6,600
20	Madagascar	\$1,100	45	Kyrgyzstan	\$2,200	70	Iraq	\$4,000	95	Algeria	\$7,100
21	Uganda	\$1,200	46	Nigeria	\$2,200	71	Morocco	\$4,000	96	Ecuador	\$7,700
22	Burma	\$1,200	47	Sudan	\$2,200	72	Cape Verde	\$4,200	97	Jamaica	\$7,700
23	Gambia	\$1,200	48	Kosovo	\$2,300	73	Paraguai	\$4,300	98	Ukraine	\$7,800
24	Mali	\$1,200	49	Micronesia	\$2,300	74	Srilanka	\$4,400	99	Tunisia	\$8,000
25	Burkina Faso	\$1,300	50	Papua New Guenea	\$2,300	75	Tonga	\$4,500	100	Palau	\$8,100

Sumber: <http://updatecampuran.blogspot.com/2013/07/100-negara-termiskin-di-dunia.html>

Tabel 1.2 Menunjukkan bahwa terdapat 100 negara termiskin di dunia berdasarkan perhitungan GDP US Dollar. Indonesia berada di urutan ke 68 dengan GDP sebesar \$3,900, sementara itu urutan 1 termiskin adalah negara Zimbabwe yang memiliki GDP sebesar \$200 dan urutan ke 100 adalah negara palau dengan GDP sebesar \$8,100. Meskipun Indonesia mengalami penurunan dalam hal kemiskinan setiap tahunnya, namun jika dilihat dari tabel 100 negara termiskin di dunia, Indonesia masih perlu mengurangi kemiskinan karena Indonesia masih tergolong miskin di mata negara di dunia.

Tabel 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2009-2013 (persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia
2009	7,87
2010	7,14
2011	6,56
2012	6,14
2013	6,25

Sumber: BPS, 2013

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2009 angka pengangguran sebesar 7,87 persen menjadi 7,14 persen di tahun 2010, tahun 2011 kembali menurun menjadi 6,56 persen menjadi 6,14 persen pada tahun 2012 dan di tahun 2013 menjadi 6,25 persen.

Tabel 1.4
Tingkat Pengangguran Beberapa Negara Tahun 2009-2013 (persen)

Negara	Umur Pekerja (Tahun)	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Amerika Serikat	16+	9,3	9,6	8,9	8,1	7,4
Arab Saudi	15+	5,4	5,5	5,8	5,6	5,7
Australia	15+	5,6	5,2	5,1	5,2	5,7
Belanda	15-64	3,7	4,5	4,4	5,3	6,7
Belgia	15+	7,9	8,3	7,2	7,5	8,4
Brazil	10+	8,1	5,3	6,0	5,5	5,8
Cina	15+	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1
Denmark	15-66	6,0	7,5	7,6	7,5	7,0
Filipina	15+	7,5	7,3	7,0	7,0	7,1
Finlandia	15-74	8,2	8,4	7,8	7,7	8,2
Hongkong	15+	5,2	4,3	3,4	3,3	3,1
Indonesia	15+	7,9	7,1	6,6	6,1	6,2
Italia	15+	7,8	8,4	8,4	10,7	12,2
Jepang	15+	5,0	5,1	4,6	4,4	4,0
Jerman	15+	7,8	7,1	5,9	5,5	5,3
Kanada	15+	8,3	8,0	7,5	7,2	7,1
Kazakhstan	15+	6,6	5,8	5,4	5,3	5,2
Korea Selatan	15+	3,6	3,7	3,4	3,2	3,1
Malaysia	15-64	3,6	3,3	3,1	3,0	3,1
Meksiko	14+	5,4	5,3	5,2	4,7	4,9
Mesir	15-64	9,4	9,0	12,0	12,7	...
Norwegia	15-74	3,2	3,6	3,3	3,2	3,5
Pakistan	10+	5,5	5,6	5,6	7,7	7,7
Perancis	15+	9,5	9,7	9,6	10,2	10,8
Singapura	15+	2,9	2,1	1,9	1,8	...
Swedia	16-64 13	8,3	8,6	7,8	8,0	8,0
Thailand	15+	1,5	1,0	0,7	0,7	...
Venezuela	15+	7,9	8,5	8,5	7,8	7,5

Sumber/Source: International Monetary Fund (IMF): (World Economic Outlook, April 2013)

Pada Tabel 1.4 menunjukkan tingkat pengangguran beberapa negara seperti negara tetangga Malaysia yang memiliki tingkat pengangguran hanya 3,6 persen dari tahun 2009 terus mengalami penurunan hingga tahun 2013, Singapura dengan angka pengangguran hanya 2,9 persen di tahun 2009 hingga 2013 terus menurun, kemudian Thailand yang juga memiliki tingkat pengangguran

hanya 1,5 persen di tahun 2009 tetap stabil hingga tahun 2013. Jika dibandingkan dengan negara tersebut Indonesia masih dapat dikatakan belum dapat bersaing dengan negara lain karena pengangguran di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara lain di dunia.

Selain itu Indonesia juga menghadapi masalah lainnya yaitu rendahnya tingkat pembangunan manusia, hal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat Indonesia. Rendahnya pembangunan manusia dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara dimana pembangunan suatu negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila hanya melihat dari besarnya pendapatan domestik bruto saja tanpa meningkatkan pembangunan manusianya. Sering kali tingginya pendapatan domestik bruto suatu negara tidak diimbangi dengan tingkat pembangunan manusia yang sejalan pula. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh kesenjangan tingkat ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.

Tabel 1.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Di Indonesia Tahun 2009-2013

Tahun	IPM
2009	71,76
2010	72,27
2011	72,77
2012	73,29
2013	73,81

Sumber Data: BPS (2005)

Tabel 1.5 Menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan 2013, yaitu sebesar 71,76 persen pada tahun 2009, 72,27 persen pada tahun 2010, 72,77 pada tahun 2011, 73,29 persen pada tahun 2012, dan 73,81 persen pada tahun 2013. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tersebut merupakan hal yang sangat positif karena 3 komponen IPM seperti pendidikan, kesehatan dan daya beli merupakan indikator yang utama dalam melihat pembangunan manusia di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. PDB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006). Semakin tinggi PDB suatu wilayah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro 2000).

Tabel 1.6
Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan 2000
Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Tahun 2009-2013

Tahun	PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (triliun)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2009	21788,50	4,63
2010	23144,58	6,22
2011	24645,66	6,49
2012	26189,38	6,26
2013	27703,45	5,78

Sumber Data: BPS (2013)

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa dari tahun 2009 PDB di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013, sementara itu pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009 adalah 4,63 persen, 2010 adalah 6,22 persen, 2011 adalah 6,49, tahun 2012 menurun menjadi 6,26, dan pada tahun 2013 juga menurun menjadi 5,78 persen. Peningkatan tersebut merupakan hal yang sangat diharapkan oleh banyak negara, karena jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka berdampak baik terhadap perekonomian di Indonesia.

Pada hakekatnya pembangunan dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan tersebut. Menurut Esmara (2011) dalam Ilmu Ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani agar dapat mengejar keterbelakangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, selama periode 2009-2013 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun tingkat kemiskinan di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dunia. Mengingat tingkat kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi tiga faktor

yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu IPM, PDRB, dan pengangguran. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu negara. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami periode yang relatif baik karena mengalami tren yang menurun dari 14,15 persen di tahun 2009 menjadi 11,47 persen di tahun 2013. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Suatu kenyataan yang membuat kita prihatin karena seolah-olah kemiskinan itu tetap muncul dan merupakan bagian dari pembangunan, padahal pembangunan ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan bukan berjalan bersama-sama. Besarnya kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada khususnya.
2. Dapat digunakan sebagai sumber masukan yang berguna bagi pemerintah Indonesia dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang serta menjadi referensi.
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe penelitian sejenis.